



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-11819 /PB/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas
Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017

29 Desember 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
(lampiran I)
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Unaudited*), berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) masing-masing. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, penyampaian LKKL Tahun 2017 disampaikan paling lambat tanggal 21 Februari 2018 untuk 31 K/L pada lampiran II.a dan tanggal 28 Februari 2018 pukul 12.00 WIB untuk 56 K/L pada lampiran II.b.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap K/L diminta untuk menyajikan LKKL Tahun 2017 *Unaudited* sesuai dengan format pada BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pada akhir tahun anggaran 2017 agar memedomani lampiran III surat ini.
5. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKKL Tahun 2017 agar memedomani lampiran IV surat ini.

6. Sehubungan dengan dilakukannya penilaian ulang aset tetap pada K/L sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, K/L diminta untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memedomani lampiran V surat ini.
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2017 diminta Kementerian Negara/Lembaga untuk:
 - a. Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari level Satker, Wilayah, Eselon I hingga KL. Contoh format telaah laporan keuangan terdapat pada lampiran VI surat ini;
 - b. Memastikan bahwa saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan aplikasi Silabi;
 - c. Menyusun kartu piutang dan daftar piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2017;
 - d. Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai pada hasil inventarisasi fisik atas persediaan per 31 Desember 2017;
 - e. Mendokumentasikan seluruh dokumen sumber transaksi, termasuk Memo Penyesuaian;
 - f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara menetapkan langkah-langkah seperlunya agar LKKL Tahun 2017 dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat dan berkualitas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 196405191984021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Inspektur Jenderal/Inspektur/Satuan Pengawas Internal seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
7. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA/WAKIL
KEPALA/DIREKTUR UMUM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
87.	Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

2